

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers&Hills,1994). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa Perencanaan pembangunan merupakan suatu unsur yang sangat penting, yaitu suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencanaan pusat atau daerah. Tujuan tersebut mungkin untuk dicapai sasaran sosial, politik, ekonomi, budaya, atau militer. Oleh karena itu persoalan yang dihadapi bukan ada atau tidak adanya rencana, tetapi persoalannya adalah menentukan rencana terbaik dari sekian banyak rencana.

Alasan pentingnya sebuah Perencanaan:

- a. *Adanya ketidaksempurnaan mekanisme pasar (market failure). Keadaan dimana masyarakat dari segi tingkat pendidikannya masih rendah tidak dapat bersaing dengan yang sudah maju. Untuk daerah yang masih terisolir tidak menerima informasi secara menyeluruh.*
- b. *Adanya ketidakpastian masa mendatang, kebijakan dan perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin timbul dikemudian hari berikut tindakan kebijakan preventif yang perlu dilakukan.*
- c. *Memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan, dapat terwujudnya proses pembangunan yang terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lainnya.*

Dari beberapa alasan diatas dapat dilihat bahwa perencanaan penting, karena kita tidak dapat memastikan kejadian apa yang terjadi dimasa yang mendatang, oleh karena itu perencanaan dibutuhkan untuk mencapai pembangunan yang terpadu dan terarah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah satuan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah tercantum dalam pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat dengan anggaran belanja Negara (Bintoro tjokromidjojo,1979). Pada tingkat perencanaan daerah, tentu perencanaan pembangunan daerah berpengaruh pada anggaran belanja daerah. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan pastinya membutuhkan pembiayaan agar perencanaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.172 Triliun. Kemudian pada tahun 2016, APBD Provinsi Sumatera Barat naik menjadi Rp. 4.50 Triliun. Selanjutnya pada tahun 2017, APBD Provinsi Sumatera Barat naik lagi menjadi Rp. 6.173 Triliun dan yang terakhir yaitu pada tahun 2018, APBD Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar Rp. 6.696 Triliun. Dari hasil APBD yang didapat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Kenaikan tersebut tentu diiringi dengan penambahan kegiatan atau perbaikan pada perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat melakukan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahun).

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk disajikan dalam pelaporan magang dengan judul “ **PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PADA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah tentang “Bagaimana Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Studi ini diambil untuk diolah dari pengambilan data dan informasi yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karangan ilmiah yang disebut Laporan Kerja Praktek (LPK), sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada Jurusan Keuangan Negara.

Adapun tujuan magang ini adalah untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kebaikan dan penyempurnaan di masa akan datang, yaitu: Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur penyusunan rencana kerja (renja) pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan baru di bidang perencanaan makro sehubungan dengan penyusunan rencana kerja (renja) pemerintah daerah.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi Bappeda Prov. Sumbar dalam menyempurnakan prosedur penyusunan rencana kerja (renja) pemerintah daerah.

c. Bagi Pembaca

Melalui laporan magang ini, diharapkan pembaca dapat menjadikan ini sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.

## **1.5 Kegiatan Magang**

Adapun dalam pemilihan tempat magang ini, penulis ingin mengetahui tentang prosedur penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada Bappeda Prov. Sumbar. Lamanya waktu magang penulis memperkirakan adalah 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 7 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2019.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegiatan magang dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Adapun pada BAB II ini membahas teori-teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Pada BAB ini berisikan gambaran umum Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Gambaran Umum, Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT**

Merupakan pembahasan mengenai prosedur penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB V PENUTUP**

Menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya.